



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURYANTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 173850

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.788.000.000**

1. Tanah Seluas 5700 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 3735 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 98.000.000
5. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
8. Tanah Seluas 17000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
9. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 478.500.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
13.500.000
3. MOBIL, TOYOTA / FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T (GUN165R-
SDTMHD) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 299.300.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 54.800.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 105.667.074

F. HARTA LAINNYA

Rp. 180.000.000

Sub Total

Rp. 2.906.267.074

III. HUTANG

Rp. 1.282.991.820

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.623.275.254

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.